



Judul : Barantan Siap Dilebur ke BNK: Perampangan Kementan
Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Perampangan Kementan Barantan Siap Dilebur Ke BNK

ANGGOTA Komisi IV DPR Riezki Aprilia mempertanyakan kesiapan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) menyambut peleburan Barantan ke dalam Badan Nasional Karantina (BNK). Adapun transformasi Barantan ini ke dalam BNK sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan.

Undang-Undang itu mengamanahkan pengintegrasian fungsi karantina kepada satu badan, yakni BNK.

"Terkait badan karantina ini, saya juga sudah menyampaikan hal sama di Kementerian lain. Nah, bagaimana kesiapan Barantan menghadapi BNK ini. Jangan sampai nanti seperti yang sudah-sudah diingatkan keteteran lagi," kata Riezki di Jakarta, kemarin.

Sebagai latar, Kementan menjadi salah satu lembaga yang terus mengalami perampangan sepanjang periode 2021 hingga 2023.

Sebelumnya, Badan Ketahanan Pangan Kementan bertransformasi menjadi Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Bapanas.

Berikutnya, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementan dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai imbas Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Dalam Perpres itu, mengatur semua kementerian lembaga yang terkait litbang, riset dan inovasi menjadi satu dalam BRIN.

Riezki Aprilia bilang, masalah reformasi kelembagaan di karantina ini menjadi salah satu perhatian di Komisi IV, mengingat ada anggaran yang melekat di dalamnya.

Komisi IV DPR tengah membahas Anggaran Alokasi Kementan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2024, termasuk penganggaran karantina di dua kementerian tersebut.

Sementara selain Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menjalankan fungsi karan-

tina melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

"Karena seperti yang kami pahami dan saya sampaikan di KKP juga, Juli 2023 itu sudah harus terealisasi. Ini kaitannya suka ataupun tidak suka, ada anggaran yang melekat di Barantan," jelasnya.

Riezki juga menyoroti program dan alokasi anggaran di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang sebelumnya Badan Litbang Kementan. BSIP sebagai lembaga yang baru bertransformasi masih perlu terus dirapikan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, berdasar surat Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Perencanaan Nasional atau Bappenas, pagu indikatif Kementan ditetapkan sebesar Rp 14,66 triliun.

Selanjutnya, rencana pagu indikatif tersebut ditujukan dalam rangka pencapaian target komoditas pertanian pada masing-masing eselon.

Adapun pagu indikatif masing-masing eselon I antara lain, Sekretaris Jenderal Rp 1,49 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 124,7 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp 3,02 triliun, Ditjen Hortikultura Rp 1,01 triliun, dan Ditjen Perkebunan Rp 1,07 triliun.

Berikutnya, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Rp 2,55 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 2,58 triliun, BSIP Rp 958,3 miliar, Badan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp 905,25 miliar dan Barantan Rp 966,8 miliar.

Pagu indikatif tersebut, lanjut Syahrul, untuk peningkatan produksi berbagai komoditas pada tahun anggaran 2024.

Antara lain, padi 55,42 juta ton, jagung 23,34 juta ton, kedelai 340 ribu ton, cabe 3 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, bawang putih 45,91 ribu ton, kopi 818 ribu ton.

Berikutnya, kakao 694 ribu ton, tebu 39,45 juta ton, kelapa 2,9 juta ton, daging sapi dan kerbau 405,44 ribu ton dan daging ayam 4 juta ton. ■ KAL